

**PERBEDAAN PERSEPSI ANTARA TOKOH MASYARAKAT
DENGAN WARGA MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK *MONEY
POLITIC* DALAM PEMILU DI DESA SINDUMARTANI
KECAMATAN NGEEMPLAK KABUPATEN SLEMAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Resti Kurniawati dan Dr. Nasiwan, M.Si./Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum,
Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Yogyakarta

Francesca_sanz08@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi antara tokoh masyarakat dengan warga masyarakat tentang praktik *money politic* di Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di tiga dusun yang terletak di Desa Sindumartani yaitu Dusun Kayen, Tambakan, dan Bokesan. Pengambilan sampel Dusun dilakukan dengan cara *purposive sampling*, sampel tokoh masyarakat diambil dengan cara *sampling jenuh*, sedangkan sampel warga masyarakat diambil dengan menggunakan *quota sampling*. Data kemudian di analisis dengan *t test independent*.

Hasil penelitian menunjukkan 100% tokoh masyarakat menganggap *money politic* menganggap *money politic* tidak berpengaruh dalam Pemilu. Sementara itu hanya 30% masyarakat yang menganggap *money politic* tidak berpengaruh, sisanya sebesar 70% menganggap *money politic* cukup berpengaruh terhadap pemikiran pemilih. Hasil uji t independen menunjukkan thitung 4,636 > ttabel 1,984 dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang artinya terdapat perbedaan persepsi antara tokoh masyarakat dengan warga masyarakat tentang praktik *money politic* dalam Pemilu di Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman

Kata kunci: perbedaan, persepsi, *money politic*, Pemilu.

DIFFERENCES IN PERCEPTIONS BETWEEN THE COMMUNITY LEADERS AND THE COMMUNITY OF THE PRACTICE OF MONEY POLITICS IN THE ELECTION HELD IN SINDUMARTANI VILLAGE, NGEMPLAK DISTRICT, SLEMAN REGENCY, THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

Resti Kurniawati and Dr. Nasiwan, M.Si/Civics and Legal Education
Faculty of Social Sciences
Yogyakarta State University
Francesca_sanz08@yahoo.com

ABSTRACT

This research was aimed at determining whether or not differences in perceptions exist between the community leaders and the community with regard to the practice of money politics in the election held in Sindumartani Village, Ngemplak District, Sleman Regency, the Special Region of Yogyakarta.

This research employed a comparative descriptive method using a quantitative approach. This research was conducted in three hamlets in Sindumartani Village, namely Kayen, Tambakan, and Bokesan. The sample were collected using the technique of purposive sampling, the sample of community leaders were collected using the technique of saturated sampling while the sample of the community were collected using the technique of quota sampling. The data were collected using questionnaires. The validity and reliability of the instrument were examined using the product-moment correlation formula of Karl Pearson. The data were analyzed using the descriptive statistical analysis technique.

The findings suggested that 100% of the community leaders perceived that money politics did not bring any effects on the election. On the other hand, only 30% of the community who perceived that money politics did not bring any effects while the remaining 70% considered money politics to have sufficient effects on the voters' mind. The independent t-test results generated a t-count value by 4.636, which was higher than the t-table value by 1.984 with a significance value by 0.000. These results suggested that the null hypothesis (H_0) was rejected and the alternative hypothesis (H_a) was accepted, meaning that differences in perceptions exist between the community leaders and the community with regard to the practice of money politics in the election held in Sindumartani Village, Ngemplak District, Sleman Regency.

Keywords: differences, perceptions, money politics, elections

PENDAHULUAN

Negara republik dengan sistem pemerintahan yang mengagungkan konsep demokrasi selama ini dianggap sebagai bentuk ideal dari suatu negara (Mansyur Semma. 2008: 175). Sama halnya dengan negara republik lainnya, negara kita selama ini juga telah mencoba untuk menjunjung tinggi konsep demokrasi dimana kedaulatan tertinggi sepenuhnya berada di tangan rakyat, sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (2) yakni, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Salah satu cara yang sering digunakan untuk mengetahui demokratis atau tidaknya suatu negara, biasanya didasarkan pada keberadaan pilar-pilar demokrasi. Dari beberapa pilar demokrasi yang ada, satu yang menjadi sorotan utama yang sering kali dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi, yaitu Pemilu. Banyak para ahli yang beranggapan bahwa hasil pemilu yang diselenggarakan secara terbuka dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dinilai cukup akurat dalam mencerminkan aspirasi serta partisipasi masyarakat (Cholisin, 2007: 136).

Tujuan Pemilu sesuai dengan yang tertuang dalam UU Pemilu yakni memilih wakil-wakil rakyat untuk membentuk suatu pemerintahan yang lebih demokratis dan kuat dengan dukungan penuh dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Pemilu sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 2 UU No. 8 Tahun 2012 yakni, Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia selama ini dianggap telah berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti serta telah mencerminkan pemerintahan yang demokratis. Namun faktanya, masih banyak hambatan yang menghalangi penyelenggaraan Pemilu agar menjadi menjadi Pemilu yang bersih, jujur dan adil. Contoh nyatanya adalah masih banyaknya kecurangan yang dilakukan para peserta Pemilu menjelang diadakannya pemungutan suara seperti praktik *money politic* dalam Pemilu Legislatif tahun 2014. Pelanggaran Pemilu dalam Pileg 2014 tercatat di dominasi oleh praktik politik uang yang mencapai hampir 52% dengan 1.716 ekpose pemberitaan, diikuti oleh penggelembungan suara dengan 593 ekpose pemberitaan, pencoblosan ulang dengan 393 ekpose pemberitaan, pelanggaran kode etik dengan 315 ekpose pemberitaan, serta 304 ekpose pemberitaan lainnya tentang penghitungan ulang (Detik. 2014. *Money Politic*, Pelanggaran Paling Banyak di Pileg 2014).

Maraknya *money politic* didukung oleh adanya fakta bahwa dalam suatu masyarakat, uang merupakan medium atau alat yang sangat signifikan untuk dapat menguasai energi dan sumber daya yang memiliki karakteristik khas, yaitu dapat dipindahkan dan dipertukarkan (*konvertible*) tanpa meninggalkan jejak tentang sumbernya (Herbert E. Alexander. 2003: 29). Semakin banyaknya peserta Pemilu yang menerapkan *money politic* dalam kampanye serta masyarakat yang memanfaatkan praktek tersebut sebagai ladang perolehan keuntungan materi, menimbulkan anggapan bahwa *money politic* itu merupakan suatu hal yang wajar dilakukan yang bahkan sudah menjadi tradisi dalam setiap pemilu.

Sulit dihilangkannya praktik *money politic* dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah semakin berkembangnya kemasakan dari *money politic* itu sendiri. Apabila pada masa yang terdahulu *money politic* identik dengan pemberian sejumlah uang, maka kini bentuk *money politic* tidak hanya sebatas uang saja. *Indonesian Corruption Watch* menemukan bahwa selain dalam bentuk konvensional yaitu pemberian uang secara langsung kepada pemilih, *money politic* juga muncul dalam bentuk (pemberian) barang, seperti alat ibadah, sembako, bahkan kupon yang dapat diuangkan pasca Pemilu (BBC Indonesia. 2014. ICW: Modus Baru Praktik Politik Uang).

Lebih ekstrim lagi, *money politic* kini muncul dengan bentuk yang lebih terstruktur tidak hanya sebatas serangan fajar tetapi telah melibatkan jabatan maupun kedudukan yang dimiliki seseorang seperti tokoh masyarakat yang memiliki kewenangan serta keberanian untuk mempengaruhi masyarakat (Arief Fadly. 2014: Lebih dari 50% Masyarakat Tertarik Politik Uang). Selain itu, belakangan *money politic* sudah lebih ditujukan untuk kepentingan bersama (kolektif) tidak hanya untuk

perorangan, seperti: pemberian barang dalam jumlah besar untuk dimasukkan dalam kas (RT, RW bahkan Dusun).

Menurut pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Hempri Suyatna (Bernadheta Dian Saraswati. 2015. *Money Politic* Terus Terjadi) masyarakat yang dengan mudah menerima *money politic* mencerminkan masyarakat yang pragmatis yang sebenarnya hanya meniru apa yang diajarkan partai politik. Dalam suatu pemilihan umum yang konteksnya Parpol, secara tidak langsung partai-partai politik yang ada mengajari masyarakat untuk bersikap dan berperilaku pragmatis karena calon yang muncul dalam Pemilu bukanlah pilihan rakyat tetapi pilihan elite pimpinan partai. Sehingga, *money politic* muncul sebagai bukti bahwa calon yang di usung masih memiliki keraguan untuk menang.

Setiap individu tentunya memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam merespon stimulus yang diterimanya. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin mengetahui ada tidaknya perbedaan antara persepsi tokoh masyarakat dengan persepsi masyarakat tentang praktik *money politic* dalam Pemilu. Tokoh masyarakat dianggap sebagai seseorang yang memiliki kedudukan sosial sehingga dihormati oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung tentu dapat memberi pengaruh terhadap cara pandang masyarakat. Sementara itu, masyarakat atau lebih tepatnya rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia diharapkan dapat menentukan pemimpinnya secara cerdas dan bijaksana. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul "Perbandingan Persepsi Antara Tokoh Masyarakat dengan Masyarakat Tentang Praktik *Money Politic* dalam Pemilu di Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Juni sampai Juli 2015.

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat formal yang ada di Desa Sindumartani dan warga masyarakat Desa Sindumartani yang telah memiliki hak pilih atau yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada pemilu terakhir yakni Pemilu Presiden tahun 2014. Sebelum menentukan sampel tokoh dan warga masyarakat, diambil dahulu sampel dusun dengan cara *purposive sampling* sehingga diperoleh Dusun Kayen, Tambakan, dan Bokesan sebagai sampel dusun. Sampel tokoh masyarakat dilakukan dengan cara sampling jenuh sehingga diperoleh sampel tokoh masyarakat yang berjumlah 5 responden, sedangkan sampel masyarakat dilakukan dengan cara *quota sampling* dengan menggunakan rumus dari Suharsimi Arikunto (2006: 134) yaitu sebanyak 10% apabila jumlah populasi lebih dari 1000 orang sehingga diperoleh hasil sebanyak 132 responden.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan angket (kuesioner) yang bersifat tertutup dengan Skala Likert. Validitas setiap butir pernyataan yang ada dalam instrumen penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus *product moment*. Instrumen diuji cobakan kepada 25 responden diluar sampel penelitian, sehingga diperoleh hasil terdapat sebanyak 30 item pernyataan yang valid dan sebanyak 15 item pernyataan yang tidak valid dari jumlah keseluruhan 45 butir. Untuk uji reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus koefisien *Alpha Cronbach*, sehingga diperoleh hasil sebesar 0,909.

Analisis data penelitian terdiri dari uji persyaratan analisis yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas serta tahap analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Data Penelitian

Hasil kategorisasi untuk persepsi tentang praktik *money politic* dalam Pemilu secara umum dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1. Distribusi Kategorisasi Persepsi Tentang Praktik
Money Politic dalam Pemilu secara umum**

No	Skor	Frekuensi		Kategori
		Jumlah	%	
1 .	$X \geq 90,00$	44	31,6	Tidak Berpengaruh
2 .	$60,00 \leq X < 90,00$	93	68,4	Cukup Berpengaruh
3 .	$X < 60,00$	0	0	Sangat Berpengaruh
Total		137	100	

Sumber: Data Primer Yang Diolah

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 93 responden atau sekitar 68,4 % dari keseluruhan responden menganggap *money politic* cukup berpengaruh dalam Pemilu. Sedangkan sebanyak 44 orang atau sekitar 31,6 % dari jumlah responden menganggap *money politic* tidak berpengaruh dalam Pemilu.

Persepsi tentang praktik *money politic* dalam Pemilu secara umum maksudnya adalah gabungan hasil persepsi tokoh masyarakat dengan warga masyarakat tentang praktik *money politic* dalam Pemilu. Masing-masing hasil kategorisasi persepsi tokoh masyarakat maupun warga masyarakat apat dijabarkan sebagai berikut:

a. Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Praktik Money Politic dalam Pemilu

Hasil kategorisasi persepsi tokoh masyarakat tentang praktik *money politic* dalam Pemilu dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

**Tabel 2. Distribusi Kategorisasi Persepsi Tokoh Masyarakat
Tentang Praktik Money Politic dalam Pemilu**

No	Skor	Frekuensi		Kategori
		Jumlah	%	
4 .	$X \geq 90,00$	5	100	Tidak Berpengaruh
5 .	$60,00 \leq X < 90,00$	0	0	Cukup Berpengaruh
6 .	$X < 60,00$	0	0	Sangat Berpengaruh
Total		5	100	

Sumber: Data Primer Yang Diolah

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa sebanyak 5 atau seluruh tokoh masyarakat yang menjadi responden (100 %) menganggap *money politic* tidak berpengaruh dalam Pemilu.

b. Persepsi Warga Masyarakat Tentang Praktik Money Politic dalam Pemilu

Hasil kategorisasi persepsi warga masyarakat tentang praktik *money politic* dalam Pemilu disajikan dalam tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3. Distribusi Kategorisasi Persepsi Warga Masyarakat
Tentang Praktik Money Politic dalam Pemilu**

No	Skor	Frekuensi		Kategori
		Jumlah	%	
7 .	$X \geq 90,00$	39	29,54	Tidak Berpengaruh
8 .	$60,00 \leq X < 90,00$	93	70,45	Cukup Berpengaruh
9 .	$X < 60,00$	0	0	Sangat Berpengaruh
Total		132	100	

Sumber: Data Primer Yang Diolah

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa sebanyak 93 responden atau sekitar 70,45 % responden menganggap praktik *money politic* cukup berpengaruh dalam Pemilu. Sedangkan sebanyak 39 responden atau sekitar 29,54 % dari jumlah responden menilai praktik *money politic* tidak berpengaruh dalam Pemilu.

2. Pembahasan

Cholisin (2007: 136), mengatakan bahwa hasil pemilu yang diselenggarakan secara terbuka dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dinilai cukup akurat dalam mencerminkan aspirasi serta partisipasi masyarakat. Akan tetapi, pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung membuka peluang adanya praktik *money politic* yang dapat mengancam keberlangsungan proses demokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi tokoh masyarakat tentang praktik *money politic* dalam Pemilu menunjukkan bahwa 100 % tokoh masyarakat terlihat menganggap *money politic* tidak memiliki pengaruh dalam menentukan pilihan ketika mengikuti Pemilu. Tokoh masyarakat formal yang ada di desa Sindumartani memang tidak menampik fakta bahwa praktik hitam ini hampir selalu ada dalam Pemilu tapi tidak memberikan pengaruh apapun dalam mempengaruhi pemikiran pemilih.

Anggapan tidak berpengaruh oleh tokoh masyarakat bagi praktik *money politic* dalam Pemilu di desa Sindumartani ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa *money politic* bukanlah suatu cara yang efektif dalam mempengaruhi pemikiran pemilih. Tokoh masyarakat menganggap faktor kecerdasan intelektual, kapabilitas, dan akseptabilitas yang dimiliki seorang peserta pemilu lebih menentukan dalam memenangkan hasil pemilu dari pada pembagian sejumlah uang.

Melihat pola pikir tokoh masyarakat yang demikian dapat kita ketahui bahwa partisipasi politik yang ditunjukkan oleh tokoh masyarakat desa Sindumartani agaknya lebih mengarah pada partisipasi politik aktif dimana mereka memiliki kesadaran politik yang tinggi sehingga tidak terlalu terpengaruh dengan keberadaan *money politic* serta memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah karena meyakini bahwa orang-orang yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan adalah orang-orang terbaik pilihan seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Tingkat partisipasi politik dari masyarakat mengindikasikan bahwa masyarakat saat ini mulai memiliki keinginan untuk mengikuti dan berusaha untuk lebih memahami permasalahan politik serta menginginkan untuk lebih terlibat langsung dalam suatu kegiatan politik. Tingginya partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang berkuasa memiliki kadar keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi, begitu pula sebaliknya (Miriam Budiardjo. 2008: 369).

Namun demikian, keinginan masyarakat untuk lebih terlibat aktif dalam kehidupan politik sering kali dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk memperoleh keuntungan dalam menduduki suatu jabatan tertentu. Bukti nyata dari persoalan ini adalah adanya praktik *money politic* yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi pilihan masyarakat sebagai pemilik hak pilih agar memilih calon-calon tertentu dalam suatu pemilu.

Berdasarkan hasil perhitungan data penelitian diketahui sebanyak 93 responden (70,45%) masyarakat menganggap *money politic* cukup mempengaruhi pemikiran pemilih dalam suatu pemilihan umum, sedangkan sebanyak 39 responden atau sekitar 29,54% dari jumlah responden menilai *money politic* tidak memiliki pengaruh dalam pemilu. Warga masyarakat yang menilai *money politic* tidak memiliki pengaruh terhadap pemikiran pemilih menganggap bahwa *money politic* sebenarnya diterima hanya sebagai bentuk protes dari masyarakat bukan perjanjian jual beli suara, sebagaimana yang dikemukakan oleh pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Hemptri Suyatna (Bernadheta Dian Saraswati. 2015. *Money Politic* Terus Terjadi).

Hemptri mengatakan bahwa diterima *money politic* oleh masyarakat tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai wujud protes dari masyarakat itu sendiri sehingga timbul pikiran daripada tidak dapat apa-apa ketika calon sudah terpilih maka momentum Pemilu dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu dari para calon. Sehingga, meskipun masyarakat menerima uang yang dibagikan para calon tetapi belum tentu mereka memilihnya karena masyarakat telah menentukan pilihannya sejak awal. Sementara itu, warga masyarakat yang menganggap *money politic* cukup berpengaruh bagi pemikiran pemilih menilai bahwa diakui atau tidak praktik ini seolah sudah menjadi tradisi wajib yang harus dilakukan peserta pemilu sebelum dilaksanakan pemungutan suara.

Banyak alasan yang melatarbelakangi anggapan wajar dari masyarakat untuk praktik *money politic* ini, salah satunya adalah alasan ketidaktahuan. Sebagian besar responden sejatinya belum mengetahui dampak, bahaya yang dapat ditimbulkan oleh praktik tersebut. Alasan lain yang

melatarbelakangi diterimanya *money politic* secara terbuka oleh sebagian masyarakat adalah karena adanya pola pikir masyarakat yang salah mengenai uang dan pemilu. Masyarakat umumnya masih menganggap pemilu sebagai waktu atau momentum yang pas untuk mengeruk keuntungan dari peserta Pemilu.

Melihat hasil penelitian yang demikian dapat kita simpulkan bahwa agaknya partisipasi politik masyarakat lebih condong ke arah partisipasi politik militan radikal. Hal ini terlihat dari besarnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti pemilu. Akan tetapi, meskipun partisipasi dalam mengikuti pemilu tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tergolong rendah karena menurut masyarakat siapapun yang duduk di kursi pemerintahan tidak memiliki dampak yang signifikan bagi nasib dan kesejahteraan masyarakat.

Johannes Muller (2006: 261) mengatakan bahwa sikap kurang peduli yang ditunjukkan oleh masyarakat ini tidak terlepas dari bayangan sikap/sifat pasrah yang menerima begitu saja nasib mereka dikarenakan pengalaman sejarah bahwa mereka akhirnya selalu kalah dan harus tunduk dengan mereka yang memili kedudukan yang lebih tinggi sehingga masyarakat sedikit acuh dan kurang percaya dengan pemerintah.

Terkait dengan perbedaan persepsi antara tokoh masyarakat dengan warga masyarakat dapat dilihat dari hasil perhitungan data penelitian yang diketahui nilai t hitung 4,636 sementara t tabel 1,984 dan nilai signifikansi 0,000. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika signifikansi kurang dari 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel maka H_0 ditolak. Sehingga dalam penelitian ini hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang artinya terdapat perbedaan persepsi antara tokoh masyarakat dengan warga masyarakat tentang praktik *money politic* dalam Pemilu di desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman.

Adanya perbedaan persepsi antara tokoh masyarakat dengan warga masyarakat tentang praktik *money politic* terlihat dari hasil perhitungan *t-test independent* dimana rata-rata persepsi masyarakat sebesar 84,78 (SD 7,608) sedangkan mean persepsi tokoh masyarakat sebesar 100,8 (SD 6,760). Berdasar hasil tersebut terlihat bahwa tokoh masyarakat menganggap praktik politik uang tidak berpengaruh terhadap pemikiran pemilih. Sementara itu, sebagian besar masyarakat menerima *money politic* sebagai wujud protes sehingga memilih untuk mengambil keuntungan di muka daripada tidak memperoleh apapun dan hanya dilupakan begitu saja ketika Pemilu usai di laksanakan.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan persepsi antara tokoh masyarakat dengan warga masyarakat tentang praktik *money politic* dalam Pemilu di desa Sindumastani kecamatan Ngemplak kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjukkan oleh hasil uji *t independent*. Hasil pengujian hipotesis data menunjukkan t hitung 4,636 > t tabel 1,984 dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil uji t tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang artinya terdapat perbedaan persepsi antara tokoh masyarakat dengan warga masyarakat tentang praktik *money politic* dalam Pemilu di desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, dapat diberikan saran bagi tokoh masyarakat hendaknya turut memerangi atau melaporkan jika terdapat praktik *money politic* tidak hanya dibiarkan meskipun *money politic* dianggap tidak berpengaruh dalam Pemilu. Bagi warga masyarakat hendaknya mulai sedikit demi sedikit melakukan perubahan pola pikir tentang *money politic* karena bagaimanapun uang hasil *money politic* hanyalah kenikmatan sejenak yang mungkin akan menimbulkan kerugian yang lebih besar di kemudian hari serta mulai turut aktif melawan praktik *money politic*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Semma, Mansyur. (2008). *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [2]. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [3]. Cholisin, dkk. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY PRESS.
- [4]. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- [5]. Alexander, Herbert E.. (2003). *Financing Politic, Politik Uang Dalam Pemilu Presiden Secara Langsung, Pengalaman Amerika Serikat*. (diterjemahkan oleh: Dwi Pratomo Yulianto, Budi Prasetyo, dan Ari Budi Santoso). Yogyakarta: Narasi.
- [6]. BBC Indonesia. (2014). *ICW: Modus Baru Praktik Politik Uang*. Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/04/140406_icw_kampanye_fasilitas_negara pada 4 desember 2015
- [7]. Arief Fadly. (2014). *Lebih dari 50% Masyarakat Tertarik Politik Uang*. Diakses dari <http://m.solopos.com/2014/07/08/pilpres-2014-lebih-dari-50-masyarakat-tertarik-politik-uang-518082> pada 4 Desember 2015
- [8]. Bernadheta Dian Saraswati. (2015). *Money Politic Terus Terjadi*. Diakses dari <http://m.harianjogja.com/baca/2015/08/10/pilkades-2015-money-politic-terus-terjadi-631507> pada 4 Desember 2015
- [9]. Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [10]. Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [11]. Muller, Johannes. (2006). *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.